



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2021- 2022 |
| Masa Persidangan | : V |
| Rapat | : Ke - 31 (Tiga Puluh Satu) |
| Jenis Rapat | : Audiensi |
| Dengan | : Pimpinan dan Anggota DPRD Komisi D DPRD Provinsi Sulsel |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, tanggal | : Senin, 20 Juni 2022 |
| Waktu | : Pukul 13.00 WIB s.d 14.50 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i> |
| Acara | : Konsultasi terkait regulasi pertambangan dan LHP BPK atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2021 |
| Ketua Rapat | : Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Nasdem) |
| Sekretaris Rapat | : Dra. Nanik Herry Murti |
| Hadir | : A. Pemerintah 1. Pimpinan dan Anggota DPRD Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan B. 24 Orang Anggota dari 52 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari: 10 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 14 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual 28 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin |

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Audiensi Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, 20 Juni 2022 dibuka pukul 13.30 WIB, dipimpin oleh Sugeng Suparwoto, selaku Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi P. Nasdem, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara: Konsultasi terkait regulasi pertambangan dan LHP BPK atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2021

II. CATATAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI telah menerima dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya:
 - a. Kegiatan operasional PT Vale Indonesia Tbk yang tidak memberikan kontribusi maksimal bagi masyarakat. Untuk itu rencana perpanjangan izin PT Vale Indonesia Tbk perlu dievaluasi
 - b. Terdapat sekitar 19 IUP yang melakukan kegiatan penambangan di kawasan kehutanan, namun tidak memiliki IPPKH dari Kementerian LHK
 - c. Kegiatan pengangkutan hasil tambang berakibat bagi rusaknya beberapa jalan provinsi yang ada di sekitar wilayah pertambangan. Penggunaan fasilitas negara seperti jalan dan pelabuhan tersebut perlu dievaluasi.
 - d. Perlunya pelibatan BUMD dalam memanfaatkan hasil *relinquish* IUP.

Terkait hal tersebut, DPRD Provinsi perlu melengkapinya dengan data-data, yang nantinya akan menjadi bahan bagi Komisi VII DPR RI untuk membahasnya lebih lanjut.

2. Komisi VII DPR RI akan menindaklanjuti hasil rapat konsultasi dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan membetuk Panja tentang PT Vale Indonesia Tbk, untuk memastikan terjadinya keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 14.50 WIB

Jakarta, 20 Juni 2022

KETUA RAPAT,



SUGENG SUPARWOTO

A-373